

Judul : Banyak Keluarga Stres: Lindungi Anak dari Kekerasan
Tanggal : Rabu, 03 Januari 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Banyak Keluarga Stres **Lindungi Anak Dari Kekerasan**

WAKIL Ketua Badan Legislati (Baleg) DPR Willy Aditya menyoroti dampak krisis iklim terhadap anak. Pemerintah diminta menegakkan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, agar krisis iklim tidak menambah korban kekerasan anak di dalam keluarga.

"Tegakkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai langkah tegas menghukum pelaku kekerasan terhadap anak. Langkah itu harus dibarengi dengan bantuan bagi keluarga Indonesia yang terancam kemiskinan dan dampak perubahan iklim," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/1/2024).

Salah satu bentuk bantuan yang harus disediakan Pemerintah, yaitu menyediakan layanan-layanan kesehatan. Termasuk, sistem perlindungan sosial yang memadai agar pencegahan kekerasan terhadap anak akibat perubahan iklim menjadi efektif hingga ke struktur pemerintahan terendah di desa.

Dia bilang, masyarakat harus terus menyuarakan dampak iklim ini terhadap kesejahteraan anak. Hal ini agar usulan RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Konservasi SDAE (Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya), dan RUU Pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) yang sudah masuk daftar panjang Prolegnas 2020-2024 bisa dilanjutkan secara komprehensif.

Willy mengungkapkan, Pemerintah tidak bisa melihat permasalahan krisis iklim yang memicu kekerasan pada anak hanya dengan sebelah mata.

Diperlukan langkah serius dan komprehensif. Jangan hanya melihat isu krisis iklim pada tataran jargon dan sebatas ekonomi dengan membuka

pasar karbon, tanpa membuat peta jalan pengendalian pencemaran dan pengembalian kapasitas alam.

"Krisis iklim dengan kekerasan terhadap anak, keduanya bisa langsung maupun tidak langsung berhubungan. Jangan lupakan, kekerasan domestik terhadap anak meningkat seiring dengan stres keluarga yang juga meningkat akibat ketidakpastian ekonomi," ujar anggota Fraksi Partai NasDem ini.

Dia bilang, anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terdampak perubahan iklim. Dampak dari kerusakan lingkungan dan perubahan iklim juga mampu memengaruhi kesehatan fisik dan mental anak-anak serta menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga.

Hal ini terjadi karena anak-anak memiliki karakteristik dan fungsi fisiologis yang berbeda dengan orang dewasa. Isu terkait pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan akibat krisis iklim merupakan wacana yang baru bagi pemerintah Indonesia sehingga komitmen tersebut harus terus dibangun.

Namun, lanjut Willy, pihaknya terus mengedepankan berbagai peraturan yang pro terhadap perlindungan anak dan perempuan. Misalnya, meminimalisir kekerasan seksual terhadap anak dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

"Ke depan masih ada RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang juga mewacanakan perlindungan terhadap pekerja anak di sektor pekerjaan domestik. Banyak undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya juga perlindungan anak terus menjadi concern bersama," ujarnya. ■ KAL